

PANDANGAN JAMA'AH TABLIGH TERHADAP POLITIK: STUDI DI KECAMATAN NANGGALO KOTA PADANG

Candra¹, Zamzami², & Deky Sukma Indra³

¹Magister Sosiologi Universitas Andalas Padang

²³Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Andalas Padang

Email: candracancen@gmail.com

Abstract

This study aims to, understand, describe and analyze the perspectives / views of the Tablighi Jamaah Nanggalo District, Padang City on the simultaneous selection of the Governor and Deputy Governor of West Sumatra in 2015. This study uses a conceptual, historical and case approach. Based on previous research, the average Tablighi Jamaah has preached by instilling anti-political ideology. But another side shows that the growth rate of the number of pilgrims is always increasing. If this phenomenon continues to develop, it is assumed that it will have an effect on the continued decline in voter turnout. The results of this study indicate that the political perceptions of the Jamaah Tabligh in Nanggalo Subdistrict have been divided into two, some of which have been directly involved and some are still surviving, not active in politics. This is based on several factors such as the diversity of social backgrounds and the diversity of religious understandings.

Keywords: *Political views, political participation, tabligh worshippers.*

A. PENDAHULUAN

Pilkada serentak Tahun 2015 merupakan bagian proses demokrasi di Indonesia, untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah baik ditingkat Provinsi Maupun ditingkat Kabupaten/Kota. Demokrasi menjadi isu utama dalam penataan struktur pemerintahan maupun tata kelola kehidupan masyarakat. Abraham Lincoln dalam pidatonya pada peresmian makam nasional Gettysburg, Amerika Serikat 1863 mengatakan, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat (*democracy is government of the people, by the people, and for the people*) (Gatara & Said, 2007). Ringkasnya, pemegang kekuasaan sejati dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat.

Bentuk perwujudan kekuasaan sejati dan kekuasaan tertinggi oleh rakyat dapat dilihat pada partisipasi politik mereka berupa keikutsertaan dalam pemilihan umum. Partisipasi masyarakat merupakan salah satu syarat

untuk mewujudkan pemerintahan yang demokratis, meskipun bentuk-bentuk partisipasi masyarakat ini dapat diekspresikan dalam berbagai macam. Pada umumnya di negara-negara demokrasi ada anggapan bahwa lebih banyak partisipasi masyarakat, akan lebih baik. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa masyarakat telah mampu mengikuti dan memahami masalah-masalah politik dan ikut melibatkan diri dalam kegiatan-kegiatan politik. Sebaliknya akan bermakna bahwa rendahnya partisipasi politik merupakan sumber masalah bagi legitimasi politik, sehingga ia selalu jadi perhatian utama bangsa.

Adalah persepsi yang salah jika penanganan kasus partisipasi rendah selalu diserahkan kepada satu pihak saja. Tetapi sesungguhnya diperlukan keikutsertaan seluruh komponen bangsa untuk menanganinya, diantaranya KPU dan Bawaslu sebagai penyelenggara pemilu, partai politik dan kandidat sebagai peserta pemilu, dan masyarakat umum sebagai pemilih serta didukung oleh peran aktif pemerintah.

Kurangnya partisipasi masyarakat pada suatu pemilihan umum akan berakibat pada melemahnya legitimasi kekuasaan, baik eksekutif maupun legislatif. Sehingga pendelegasian dan penyerahan kedaulatan rakyat akan menjadi cacat dan bisa menjadi inkonstitusional. Padahal harapan sesungguhnya dari pemilu itu adalah terwujudnya kesejahteraan dan kepentingan masyarakat luas secara adil dan merata.

Jika Partisipasi rendah, maka dikhawatirkan kebijakan-kebijakan yang dihasilkan oleh penguasa yang baru tidak bisa mewakili keinginan dan harapan masyarakat secara umum. Demikianlah arti pentingnya partisipasi dalam mewujudkan suatu negara yang demokratis, sehingga sistem pemilihan umum dari periode keperiode selalu dilakukan perbaikan dan penyempurnaan serta penyesuaian dengan situasi dan kondisi politik yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Kurangnya partisipasi masyarakat dalam suatu pemilihan tidak terlepas dari Stigma politik yang kotor, jahat, menghalalkan segala cara dan lain

sebagainya. Hal ini semakin memperburuk kepercayaan masyarakat terhadap politik, sehingga membuat sebagian masyarakat enggan untuk menggunakan hak pilih. Stigma politik tersebut terbentuk akibat akumulasi perilaku politisi dengan kategori politisi instan. Politisi instan biasanya baru mendekati pemilih ketika agenda politik sudah mendesak, namun jarang menemui masyarakat dikala senggang. Maka kondisi seperti itu akan semakin meruntuhkan kepercayaan masyarakat pada politisi dan pemilu (Arianto, 2011). Disamping itu, pemahaman ideologis yang kontra demokrasi juga diasumsikan turut memberikan sumbangsih terhadap lemahnya partisipasi. Dimana pembiaran akan berkembangnya idiologi apatis pada akhirnya akan terus melahirkan golput dan menurunnya partisipasi memilih.

Walaupun keadaan muslim Indonesia dahulu dan sekarang cukup berbeda soal pandangannya terhadap politik, namun mayoritas muslim Indonesia masih terlihat tidak bisa terlepas dari keberagaman idiologi, sebut saja kelompok-kelompok pergerakan seperti ikhwanul muslimin, hizbuttahrir, salafi, majlis mujahidin, jamaah tabligh dan lain sebagainya. Kelompok kelompok ini dikenal lebih kental pada pemahanan Islam yang disebut dengan Islam fundamental. Walaupun diantara pemahaman mereka ada yang cenderung tidak kontradiktif dengan pemahaman dan semangat demokrasi, tapi tidak sedikit juga yang menunjukkan kontras. Sebagaimana yang selalu di wacanakan oleh HTI dan Salafi tentang semangat mendirikan Khilafah, tentu sangat berpengaruh pada angka partisipasi pemilih (Zawawi, 2015).

Begitu juga dengan Jamaah Tabligh, disamping gerakan yang satu ini juga sudah bersifat internasional, gerakan ini juga sering lebih cendrung tidak berbicara politik. Walaupun tidak berniat mengusung pendirian Negara Islam, tapi jika kehadiran Jamaah Tabligh yang selalu menanamkan idiologi yang anti politik maka dikhawatirkan angka Golput pun akan semakin meningkat (Junaedi, 2013).

Diantara hasil penelitian yang pernah ada mengatakan bahwa, sudah menjadi ciri khas bagi jamaah tabligh dalam berdakwah, dimana mereka murni

menjalankan misi dakwah amar makruf nahi munkar. Mereka tidak mau terlibat bahkan anti terhadap dunia politik. Gerakan Jamaah Tabligh adalah gerakan yang tidak mau bersinggungan dengan masalah politik. Oleh sebab itu dakwah Jamaah Tabligh terkesan lebih mengemukakan dakwah yang lebih *Soft* dibanding gerakan Islam lainnya, mereka lebih menginginkan hidupnya Syariat Islam dalam bentuk memakmurkan Mesjid-Mesjid dengan memperkuat Iman dan Amal Sholeh.

Berangkat dari latar belakang diatas maka peneliti ingin memfokuskan penelitian ini pada pandangan Jamaah Tabligh Kecamatan Nanggalo terhadap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Barat Tahun 2015.

B. TINJAUAN PUSTAKA

1. Konsep Perspektif/Pandangan

Menurut Kriyantoro dalam Herlambang (2011), perspektif disebut juga sebagai pendekatan. Ada dua sifat perspektif, yaitu yang bersifat membatasi pandangan dan selektif. Berdasar perspektif itu, seseorang memperhatikan, menginterpretasi dan memberi stimuli dari realitas yang ditemui serta mengabaikan stimuli lainnya, kemudian berperilaku berdasarkan pemahamannya lewat perspektif tersebut. Diantara penelitian yang bicara perspektif politik Jamaah Tabligh adalah:

Jamaah Tabligh adalah sekelompok orang yang tidak memiliki nama resmi organisasi, namun bergerak dalam bidang dakwah dengan ciri khas pakaian serba putih yang menandakan kesucian hati. Dengan aktivitas memfokuskan diri dalam meningkatkan dan memperbaiki iman dan amal shalih tanpa mencampurnya dengan urusan politik (Najmudin, 2015).

Sebagai lembaga dakwah, *Jama'ah Tabligh* terdiferensiasi dengan lembaga-lembaga lainnya dalam beberapa hal: Lahir bukan atas latar belakang politis dan menjauhi hal-hal yang berhubungan dengan politik dan bahkan melarang anggotanya untuk tidak terlibat dalam politik (Nisa, Husaini, dan

Alamsyah, 2017). Jama'ah Tabligh memiliki ciri khas bila berdakwah tidak membicarakan masalah politik dan khilafiyyah (Mustofa, 2016).

Sementara itu dalam Ensiklopedia Indonesia, Pandangan diartikan sebagai proses mental yang menghasilkan bayangan diri individu, sehingga dapat mengenal suatu objek dengan jalan asosiasi pada suatu ingatan tertentu baik secara indera penglihatan, indera peraba dan sebagainya sehingga akhirnya bayang itu dapat disadari (Sadhly, 1984). Sedangkan menurut Wirawan (1984), pandangan adalah persepsi seseorang terhadap obyek yang bersifat positif, negatif ataupun netral yang didapat dari proses belajar.

2. Konsep Golput

Eep Saefulloh Fatah telah mengklasifikasikan empat golongan golput yaitu: *Pertama*, golput teknis, yakni mereka yang karena sebab-sebab teknis tertentu (seperti keluarga meninggal, ketiduran, dan lain-lain) berhalangan hadir ke tempat pemungutan suara, atau mereka yang keliru mencoblos sehingga suaranya dinyatakan tidak sah. *Kedua*, golput teknis-politis, seperti mereka yang tidak terdaftar sebagai pemilih karena kesalahan dirinya atau pihak lain (lembaga statistik, penyelenggara pemilu). *Ketiga*, golput politis, yakni mereka yang merasa tak punya pilihan dari kandidat yang tersedia atau tak percaya bahwa pileg/pilkada akan membawa perubahan dan perbaikan. *Keempat*, golput ideologis, yakni mereka yang tak percaya pada mekanisme demokrasi (liberal) dan tak mau terlibat di dalamnya entah karena alasan fundamentalisme agama atau alasan politik-ideologi lain.

Sedangkan menurut Novel Ali (1999), di Indonesia terdapat dua kelompok golput *Pertama*, adalah kelompok golput awam. Yaitu mereka yang tidak mempergunakan hak pilihnya bukan karena alasan politik, tetapi karena alasan ekonomi, kesibukan dan sebagainya. Kemampuan politik kelompok ini tidak sampai ke tingkat analisis, melainkan hanya sampai tingkat deskriptif saja. *Kedua*, adalah kelompok golput pilihan. Yaitu mereka yang tidak bersedia menggunakan hak pilihnya dalam pemilu benar-benar karena alasan politik.

Misalnya tidak puas dengan kualitas partai politik yang ada. Atau karena mereka menginginkan adanya satu organisasi politik lain yang sekarang belum ada. Maupun karena mereka mengkehendaki pemilu atas dasar sistem distrik, dan berbagai alasan lainnya. Kemampuan analisis politik mereka jauh lebih tinggi dibandingkan golput awam. Golput pilihan ini memiliki kemampuan analisis politik yang tidak Cuma berada pada tingkat deskripsi saja, tapi juga pada tingkat evaluasi.

3. Konsep Partisipasi

Tindakan Golput yang dilakukan oleh Aktivistis Gerakan Islam yang tersebar di HTI, Salafy dan MMI-JAT, di Kota Surakarta merupakan tindakan rasional instrumental yaitu tindakan yang penuh kesadaran dengan adanya tujuan yang sejalan dengan cara yang ditempuh. Tindakan ini juga bertipe Golput politis ideologis, yaitu Golput yang dilakukan karena adanya kekecewaan politik karena parpol Islam yang terlibat di dalam proses demokrasi tidak sesuai harapan dari gerakan Islam non parlementer untuk menyuarakan syariat Islam.

Ada dua faktor utama yang mempengaruhi pemilih dalam menentukan penggunaan hak pilihnya yaitu kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah (Ramlan Surbakti, 1992). Paige dalam Surbakti (1992) telah membagi partisipasi politik kedalam empat faktor, pertama jika warga negara memiliki kesadaran politik dan kepercayaan kepada pemerintah yang tinggi, maka partisipasi cenderung aktif. Kedua jika kesadaran politik dan kepercayaan pada pemerintah rendah, maka partisipasi politik cenderung pasif (apatis). Kategori ketiga adalah militan Radikal, yakni apabila kesadaran politik tinggi tetapi kepercayaan kepada pemerintah sangat rendah. Selanjutnya, apabila kesadaran politik, sangat rendah, namun kepercayaan pada pemerintah sangat tinggi, maka partisipasi ini disebut tidak aktif (Pasif).

Partisipasi didefinisikan sebagai kegiatan-kegiatan sukarela dari warga masyarakat, dimana mereka mengambil bagian dalam proses pemilihan

penguasa, dan secara langsung atau tidak langsung, dalam proses pembentukan kebijaksanaan umum. Kebalikannya disebut apatis (*apathy*). Ada yang tidak ikut memilih karena sikap acuh tak acuh dan tidak tertarik oleh, atau kurang paham mengenai, masalah politik. Ada juga karena tidak yakin bahwa usaha untuk mempengaruhi kebijakan pemerintah akan berhasil dan ada juga yang sengaja tidak memanfaatkan kesempatan memilih karena kebetulan berada dalam lingkungan dimana ketidaksertaan merupakan hal-hal yang terpuji. Hal tersebut merupakan hal yang positif karena memberi fleksibilitas kepada sistem politik, dibanding dengan masyarakat yang warga negaranya terlalu "aktif" (Budiarjo, 1998).

C. METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Provinsi Sumatera Barat. Unit Analisisnya adalah komunitas Jamaah Tabligh yang diwakili oleh para individu-individu yang tergabung kedalam Halaqoh Jamaah Tabligh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan penentuan informan secara *purposive sampling* (Salim, 2006).

Teknik Pengumpulan Data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara mendalam (*indepth interview*), pengamatan/observasi, dan diskusi kelompok (FGD). Terdapat tiga jalur analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan (miles dan Hubberman, 1992).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk menjelaskan pemahaman Jamaah Tabligh terhadap Politik/Pemilu, maka penulis akan menampilkan data dari hasil wawancara kepada Informan sebagai berikut:

Tabel 1
Pemahaman Jamaah Tabligh Terhadap Politik/Pemilu

No	Pengelompokan	Jumlah (Orang)
1	Pembahasan Politik/Pemilu Oleh Jamaah	
	Tidak Pernah	10
	Pernah	5
	Sering	0
2	Arahan Jamaah untuk aktif berpolitik/Pemilu	
	Ada	2
	Tidak ada	13
3	Informasi tentang Pemilu dari non Jamaah	
	Dari penyelenggara Pemilu (KPU/Bawaslu)	8
	Dari Media cetak/elektronik	7
	Dari lainnya	0
4	Larangan membahas Politik/Pemilu Oleh Jamaah	
	Ada	4
	Tidak Ada	11
5	Jamaah Yang terdaftar dalam DPT (Daftar Pemilih)	
	Ada	11
	Tidak Ada	4
6	Keikutsertaan dalam Kampanye	
	Ada	3
	Tidak Ada	12
7	Memberikan Hak suara pada Pemilu Gubernur	
	Ada	9
	Tidak Ada	6
8	Orientasi Ikut Memilih	
	Keinginan sendiri	12
	Ajakan Kawan	0
	Arahan Jamaah	1
	Karena Uang	0
	Lainnya	2

Dari data tabel hasil wawancara diatas dapat diketahui bahwa Informan yang merupakan Jamaah Tabligh di Kecamatan (halaqoh) Nanggalo memiliki keberagaman dalam pemahaman politik dan pemilu. Disamping itu mereka juga berbeda dalam memahami informasi yang diterima dari jamaahnya dibuktikan dengan terjadinya perbedaan dalam keikutsertaannya dalam politik

dan keterlibatan serta partisipasinya dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Sumatera Barat Tahun 2015.

Semaraknya dakwah Islam oleh pergerakan Jamaah Tabligh telah memberikan warna tersendiri dalam kehidupan Islam di Indonesia bahkan dunia. Berbeda dengan jamaah atau harakah lainnya, Jamaah Tabligh seantero dunia telah mampu membangun jaringan untuk menyampaikan dakwahnya yang terkenal dengan ajakan untuk mencari Iman dan Amal Sholeh. Tidak hanya saling menukar jamaah antar marhalah dan halaqoh, tapi antar Markaz bahkan kunjungan khuruj internasional dengan sebutan lain adalah Khuruj ke Negri Jauh.

Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh dalam mentransformasikan nilai-nilai Islam selalu mengajak Orang lain untuk kembali menghidupkan nilai nilai keislaman terutama sekali untuk menanamkan rasa keimanan dan ibadah (amal Sholeh). Jamaah Tabligh mendakwahkan Islam kepada masyarakat tanpa mempersoalkan aliran, mazhab, dan khilafiah. Salah satu tujuan dakwah Jamaah Tabligh adalah memakmurkan mesjid terutama pada waktu-waktu salât. Secara garis besar kegiatan Jama'ah Tabligh terbagi kedalam dua kegiatan yaitu amalan Khuruj dan amalan diluar Khuruj.

Khuruj atau disebut juga amalan *intiqoli* adalah Program dakwah dan belajar keislaman diluar lokasi tempat tinggal (marhalah) untuk menghidupkan dakwah dan amar makruf nahi munkar yang dipahami sebagai kerja utama bagi umat nabi Muhammad SAW, biasanya mempunyai hitungan hari yang boleh dipilih sesuai kemampuan (1 hari atau 3 hari atau 7 hari atau 10 hari atau 40 hari atau 4 bulan). Adapun khuruj dengan masa 3 hari atau kurang biasanya cukup itiqof dalam satu mesjid/Mushola/Surau (dan sebutan lain) jika hitungannya 40 hari atau 4 bulan maka dilakukan dengan berpindah dari satu mesjid ke mesjid lain, dari satu marhalah ke marhalah lain. Lokasi yang dituju adalah berdasarkan hasil musyawarah Markaz yang menugaskan dan kerjasama dengan Markaz yang dituju. Kerja sama ini mereka ibaratkan dengan

kerjasama antara kaum hijrah dan kaum anshor, sehingga dengan demikian diharapkan turunlah hidayah.

Adapun program dakwah yang dilakukan dalam kondisi khuruj diantaranya adalah: memakmurkan Mesjid, mendakwahkan Islam kepada masyarakat tanpa mempersoalkan aliran, mazhab, dan khilafiah. Ta'lim wa ta'lum (mengajar dan belajar) yang biasa dilakukan setelah melaksanakan salat wajib, dan yang menjadi referensi utama disaat Taklim ini biasanya buku berjudul *Fadhail Amal* karya Maulana Zakaria. Kitab ini berisi tujuh keutamaan, yaitu: keutamaan al-Qur'an, keutamaan shalat, keutamaan dzikir, keutamaan tabligh, hikayat para sahabat, kemerosotan umat dan keutamaan ramadhan. Disamping itu mereka masih merujuk buku lain seperti *Riyadhushsholihin*, *Ihya Ulumuddin*, *Fath Al Muin* dan semua kitab tafsir.

Amalan lain yang mereka lakukan bila mukim di suatu mesjid adalah membaca al-Qur'an, salat tahajud, salat dhuha, dan lain-lain. Salat berjama'ah di mesjid merupakan amal yang sangat disiplin dilakukan oleh Jama'ah Tabligh baik saat berdakwah maupun saat di rumah. *Jaulah*, adalah bagian kegiatan yang dilakukan saat Khuruj secara berkeliling dari satu rumah ke rumah yang lain untuk mengajak umat Islam salat di mesjid sekaligus untuk mendengarkan bayan atau ceramah agama yang disampaikan setelah salat fardhu.

Menurut Hadi (2014), disaat kegiatan khuruj ada beberapa hal yang selalu menjadi standar pakem yang harus ditaati semua jamaah, diantaranya:

1. Empat hal yang diperbanyak: dakwah, taklim, zikir ibadah, khidmat.
2. Empat hal yang harus dikurangi: makan-minum yang berlebihan, istirahat/tidur, berbicara yang sia-sia/tidak perlu, keluar/meninggalkan mesjid.
3. Empat hal yang harus dijaga: hubungan dengan amir dan jama'ah lainnya, amalan infiradi dan jama'I, kehormatan mesjid, sabar dan tahammul (tahan ujian).

4. Empat hal yang harus ditinggalkan: meminta kepada yang selain Allah, mengharap kepada yang selain Allah, menggunakan barang orang lain tanpa izin, boros dan mubajir.
5. Empat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat.

Amalan Maqomi adalah amal dan dakwah sewaktu kembali dari Khuruj yaitu ketika sudah kembali dirumah masing-masing, pada prinsipnya adalah membawakan amalan amalan pada waktu khuruj di tempat tinggal dan lingkungannya, namun agak lebih longgar. Seperti Sholat Fardu tepat waktu, sholat sunnah dan nafil, dzikir pagi dan petang, tilawah Al-Quran, Taklim bersama anggota keluarga dirumah, Musyawarah dirumah, Sunnah dan Adab adab. Selain itu ditambah lagi dengan silaturrami 2.5 jam ke rumah tetangga, datang ke Markaz setiap Kamis Petang dan bawa taskilan (orang baru yang diajak) lalu datang tiap Selasa malam pada musyawarah halaqoh.

Pada saat Amalan Maqomi ini sedapat mungkin juga dianjurkan melakukan amalan adab khuruj walau tidak lagi bersifat wajib, termasuk didalamnya melakukan Empat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat.

Jadi dikarenakan Jamaah Tabligh selalu mengamalkan anjuran-anjuran berupa Empat hal yang tidak boleh dibicarakan: politik, ikhtilaf, pangkat dan kedudukan, kebaikan atau jasa dan aib orang lain/masyarakat, maka perhatian rata-rata jamaah terhadap Politik juga semakin berkurang. Alasan sebagian Informan adalah: *“untuk menghindari permusuhan didalam masyarakat, karena jika permusuhan sempat terjadi maka dakwah akan sulit dibangun kembali”*.

Namun walau demikian diantara jamaah tetap masih ada yang memiliki interaksi dengan masyarakat dan membicarakan politik, hal ini terungkap oleh Informan sebagaimana yang kita lihat pada Tabel 3 tentang latar belakang pemahaman Jamaah Tabligh terhadap Politik/Pemilu (diatas). Walaupun ada 10 orang yang mengatakan tidak pernah membicarakan politik disaat khuruj

namun ternyata masih ada 5 (lima) orang yang mengaku pernah mendengar pembicaraan politik disaat khuruj.

Dengan demikian, images inklusif yang melekat pada jamaah tabligh ternyata tidak berlaku pada jamaah Tabligh di Halaqoh kecamatan Nanggalo Kota Padang ini. Hal ini bisa jadi di latar belakang oleh beberapa faktor yang diantaranya adalah adanya arahan dari sebagian jamaah agar aktif dalam politik/pemilu, semakin banyaknya informasi yang diserap jamaah dari luar jamaah sendiri terutama dari penyelenggara Pemilu seperti KPU dan Bawaslu, semakin longgarnya aturan Khuruj sehingga terkadang larangan membahas politik disaat khuruj semakin berkurang.

Selanjutnya dari tabel tiga kita bisa membaca bahwa ternyata sebagian Informan yang merupakan Jamaah yang tergabung kedalam Halaqoh Kecamatan Nanggalo itu sudah ada yang aktif dalam berpolitik, bahkan ada yang ikut berkampanye bahkan dari pengakuan kepada peneliti sudah ada diantara mereka yang menjadi partai politik. Sehingga images bahwa Jamaah tabligh adalah apatis dalam pemilu sudah terbantahkan melalui penelitian ini, sebagai bukti pada tabel 3 bahwa diantara 9 (sembilan) responden menyatakan ikut memilih pada pemilihan gubernur dan wakil gubernur Sumatera Barat Tahun 2015. Menariknya lagi hal ini di akui informan bahwa hal tersebut dilakukannya berdasarkan keinginan sendiri.

E. SIMPULAN

Jamaah Tabligh merupakan gerakan yang bermula dari India dan telah berkembang keseluruh penjuru dunia. Dalam dakwahnya di Kecamatan Nanggalo Kota Padang, Jamaah Tabligh juga menanamkan idiologi keagamaan, yaitu melarang anggotanya untuk membicarakan Khilafiah dan politik disaat melakukan Khuruj dan menganjurkan meninggalkan pembicaraan Khilafiah dan politik disaat kembali kerumah masing-masing. Namun dalam perjalanannya Jamaah Tabligh mengalami pemahaman idiologi yang beragam, dimana ada yang tetap bertahan untuk meninggalkan pembicaraan politik dan

Khilafiah sehingga cenderung apatis. Sebahagian lagi tetap masih menganggap kegiatan politik seperti pemilu sebagai kebutuhan hidup berbangsa dan bernegara, sehingga ada diantara informan yang mengaku pernah aktif ikut berkampanye dan ikut serta memberikan hak suaranya dalam pemilu.

DAFTAR PUSTAKA

- Arianto, B. (2011). Analisis Penyebab Masyarakat Tidak Memilih Dalam Pemilu. *Jurnal Ilmu Politik dan Ilmu Pemerintahan*, 1(1), 51-60.
- Budiarjo, M. (1998). *Partisipasi dan Partai Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Gatara, A. A. S., dan Said, M. D. (2007). *Sosiologi Politik: Konsep dan Dinamika Perkembangan Kajian*, Bandung: Pustaka Setia.
- Gaffar, A. (1992). *Javanese Voters: A Case Study of Election under a Hegemonic Party System*. Yogyakarta: UGM Press.
- Hadi, M. (2014). Unsur Sufisme Dalam Jamaah Tabligh. *Jurnal Tapis*, 14(2).
- Haq, M. A. (1972). *The Faith Movement of Maulana Muhammad Ilyas*. London: George Allen & Unwin Ltd.
- Hasanah, U. (2014). Keberadaan Kelompok Jamaah Tabligh dan Reaksi Masyarakat (Perspektif Teori Penyebaran Informasi dan Pengaruh). *Jurnal Indo-Islamika*, 4(1), 21-44.
- Junaedi, D. (2013). Memahami Teks, Melahirkan Konteks: Menelisis Interpretasi Ideologis Jamaah Tabligh. *Journal of Qur'an and Hadith Studies*, 2(1), 1-17.
- Masud, M. K. (2000). *Travellers in Faith; Studies of the Tablighi Jama'at as a Transnational Islamic Movement for Faith Renewal*. Leiden: Brill.
- Mustofa, M. B. (2016). *Gerakan Dakwah Jamaah Tabligh dikalangan Wanita dalam pebinaan keluarga Muslim di Kota Bandar Lampung*. Institut Agama Islam Negeri Raden Intan Lampung.
- Najmudin, M. (2015). *Strategi Jama'ah Tabligh untuk Mempertahankan Eksistensinya atas Respon dari Globalisasi di Inggris*. Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Nisa, K., & Taher, A. (2017). Perkembangan Komunitas Jama'ah Tabligh di Desa Lamme Garot (Cot Goh) Kecamatan Montasik Kabupaten Aceh Besar, 1980-2015. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Jurusan Pendidikan Sejarah*, 2(1).
- Sadhly, H. (1984). *Ensiklopedia*. Jakarta: Ichtisar Baru.
- Sari, N. (2015). *Aktivitas Dakwah Jamaah Tabligh di Palembang*. UIN Raden Patah Palembang.
- Shidiq, M. M., dan Abdillah, M. T. (2012). *Fadhail Amal*. Bandung: Pustaka Ramadhan.

- Sisk, T. D., dkk. (2002). *Demokrasi di Tingkat Lokal, Buku Panduan International Mengenai Keterlibatan, Keterwakilan, Pengelolaan Konflik dan Pemerintahan*, IDEA Seri 4. Jakarta: AMEPRO.
- Surbakti, R. (1992). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: Grasindo
- Tarmizi. (2016). *Metode Dakwah Jamaah Tabligh dalam meningkatkan Silaturahmi dengan Masyarakat*. Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Sultan Syarif Kasim Riau.
- Zawawi, A. (2015). Politik Dalam Pandangan Islam. *Ummul Qura*, 5(1), 85-100.